



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

ROADMAP HABITAT NASIONAL 2020-2024

RENCANA AKSI HABITAT NASIONAL 2020

RENCANA AKSI PENANGANAN SAMPAH SUNGAI CITARUM 2020

LANGKAH BERSAMA
MEMBANGUN HABITAT
UNTUK SEMUA



Habitat Indonesia National Secretariat



LANGKAH BERSAMA
MEMBANGUN HABITAT
UNTUK SEMUA

KATA PENGANTAR

Berbagai tantangan dan peluang pembangunan permukiman dan perkotaan bermunculan seiring dengan pesatnya pertumbuhan penduduk hasil urbanisasi. Menghadapi kondisi tersebut, Visium PUPR 2030 memiliki mimpi untuk mewujudkan 100% smart living atau Hunian Cerdas. Visium ini dijadikan acuan berbagai program pembangunan infrastruktur perumahan, permukiman, dan perkotaan (bidang Habitat).

Lingkup kegiatan pembangunan bidang Habitat yang luas menuntut diperlukan keterlibatan berbagai pihak. Program/ kegiatan dan dukungan dari berbagai aktor seperti instansi pemerintah/pemda, perguruan tinggi dan para pakar, asosiasi profesi, lembaga swasta dan filantropi, LSM, media, dll menjadi bagian penting dilakukan pada tahap perencanaan, implementasi pembangunan, monitoring dan evaluasi, maupun penyebarluasan informasi penyelenggaraan habitat.

Banyaknya aktor yang terlibat dalam pembangunan bidang Habitat membuat diperlukan suatu tools untuk menyinergikan. Bertepatan dengan momentum Hari Habitat Dunia dan Hari Kota Dunia 2019 ini, disusunlah Roadmap Habitat Nasional 2020-2024 dan Rencana Aksi 2020. Roadmap dan Rencana Aksi ini disusun sebagai bentuk keseriusan Indonesia dalam upaya mewujudkan komitmen dan target New Urban Agenda (NUA) dan Sustainable Development Goals (SDGs). Roadmap dan rencana aksi ini diharapkan dapat menjadi acuan bersama untuk melangkah dan mengimplementasikan program dan kegiatan bidang Habitat sehingga harapan terwujudnya Hunian Cerdas dapat tercapai.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

M. Basuki Hadimuljono



DAFTAR ISI

- 4 Kata Pengantar
- 6 Daftar Isi
- 8 Pendahuluan
- 10 Konteks
- 14 **1. Merevitalisasi *Center of Excellence* Bidang Habitat**
 - 16 A. Simpul pengetahuan habitat
 - 18 B. Menjaring kemitraan multipihak
 - 20 C. Peran Indonesia dalam agenda habitat global
- 24 **2. Habitat Layak Huni dan Berkelanjutan untuk Semua**
 - 26 A. Simpul pengetahuan habitat
 - 28 B. Menjaring kemitraan multipihak
 - 29 C. Peran Indonesia dalam agenda habitat global
 - 30 D. Habitat infrastruktur dan lingkungan
- 34 **3. Langkah Bersama Lima Tahun ke Depan**
- 40 **4. Rencana Aksi Habitat Nasional 2020**
- 48 **5. Rencana Aksi Penanganan Sampah Sungai Citarum 2020**



PENDAHULUAN

1. Pembangunan bidang habitat melingkupi pembangunan perumahan, permukiman dan perkotaan, yang tak terlepas dari pembangunan wilayah dan perdesaan. Persoalan perkotaan yang kompleks dan multidimensi menjadikan cakupan pembangunan habitat tidak bisa dilaksanakan secara sektoral atau menangani infrastruktur semata, melainkan harus holistik, sinergi lintas sektor dan multipihak, serta terpadu antar wilayah.
2. Roadmap Habitat Nasional 2020-2024 dan Rencana Aksi Habitat Nasional 2020 mendorong penguatan kelembagaan dan memposisikan kembali Seknas Habitat sebagai suatu *center of excellence* bidang habitat yang mengoordinasikan penyelenggaraan Agenda Habitat Nasional oleh seluruh aktor pembangunan perumahan, permukiman, dan perkotaan di Indonesia. Penguatan lembaga ini bertujuan untuk memperlancar arus informasi-komunikasi lintas sektor dan multipihak guna mendukung pembangunan habitat yang layak huni dan berkelanjutan, termasuk berbagai peluang pada konstelasi global.
3. Bab pertama, berjudul "Merevitalisasi *Center of Excellence* Bidang Habitat", mendeskripsikan peran Seknas Habitat sebagai knowledge hub atau simpul pengetahuan bidang habitat, simpul jejaring kemitraan multipihak, serta perannya dalam agenda habitat global, khususnya dalam kegiatan-kegiatan UN-Habitat.
4. Bab kedua, berjudul "Habitat Layak Huni dan Berkelanjutan untuk Semua", menjelaskan visi pembangunan perkotaan dan wilayah untuk mewujudkan habitat yang layak huni, berkelanjutan, dan inklusif di Indonesia. Perwujudan habitat ini menghadapi berbagai isu, tantangan dan peluang yang melingkupi pembangunan (i) habitat kawasan permukiman perkotaan, (ii) habitat kawasan permukiman perdesaan, (iii) habitat kawasan strategis nasional, serta (iv) habitat infrastruktur dan lingkungan.
5. Bab ketiga, berjudul "Langkah Bersama Lima Tahun ke Depan", menjelaskan program, kegiatan ataupun aksi bersama pembangunan habitat di Indonesia dalam kurun waktu 2020-2024. Berbagai upaya yang direncanakan sejalan dengan RPJMN 2020-2024, Rencana Strategis UN-Habitat 2020-2023, serta selaras dengan pelaksanaan komitmen NUA dan pencapaian SDGs bidang habitat.

6. Bab keempat adalah “Rencana Aksi Habitat Nasional 2020” yang memuat berbagai usulan kegiatan dan aksi bersama dalam pembangunan habitat yang dikoordinasikan oleh Seknas Habitat pada tahun 2020. Sebagai tahap awal roadmap 2020-2024, rencana aksi 2020 adalah fondasi dalam merevitalisasi Seknas Habitat dan keterlibatan berbagai aktor pembangunan di Indonesia.

7. Roadmap dan rencana aksi habitat nasional ini disusun secara inklusif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam rangkaian Peringatan Hari Habitat Dunia dan Hari Kota Dunia 2019. Aktor-aktor pembangunan yang dilibatkan meliputi berbagai kementerian/lembaga, pemerintah daerah, kelompok pakar dan akademisi/ perguruan tinggi, asosiasi pemerintah dan profesi, lembaga swasta, filantropi, komunitas/kelompok masyarakat, dan media. Dokumen yang dihasilkan merupakan suatu dokumen hidup (*living document*) milik bersama yang dapat terus diperkaya dan diperbarui dalam koordinasi Seknas Habitat.

**Roadmap Habitat Nasional
2020-2024 dan Rencana
Aksi Habitat Nasional 2020
mendorong penguatan
kelembagaan dan
memposisikan kembali
Seknas Habitat sebagai
suatu *center of excellence*
bidang habitat**

KONTEKS

LANGKAH BERSAMA MEMBANGUN HABITAT UNTUK SEMUA

8. **Mengelola urbanisasi yang berkelanjutan.** Indonesia mengalami laju urbanisasi yang sangat pesat dan diperkirakan lebih dari 70% penduduk akan tinggal di kawasan perkotaan pada tahun 2045. Pesatnya laju urbanisasi ini merupakan tantangan sekaligus peluang untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dewasa ini, laju urbanisasi di Indonesia berjalan dengan tidak terencana sehingga potensi dari urbanisasi belum dapat dimanfaatkan untuk mendorong pembangunan yang menyejahterakan, inklusif, dan layak huni.

9. Pembangunan perkotaan di Indonesia masih dihadapkan pada tantangan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar seperti akses air minum dan sanitasi, serta perumahan yang layak huni dan terjangkau bagi semua. Sementara itu, dalam upaya mewujudkan urbanisasi yang terkelelola dan berkelanjutan, pembangunan perlu

dilakukan tidak hanya melalui pemenuhan infrastruktur dasar, melainkan dari berbagai aspek lain seperti mobilitas, perubahan kultur masyarakat, tata kelola, kelembagaan maupun pembiayaan.

10. Pembangunan perkotaan juga tidak dapat dilepaskan dari kerangka pengembangan wilayah dimana kawasan perdesaan memegang peranan penting dalam hubungan desa-kota. Pembangunan perdesaan dalam hubungan desa-kota perlu direncanakan dan dikelola dengan baik untuk dapat mendukung terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

11. **Pengarusutamaan NUA.** Konteks pembangunan perkotaan di Indonesia tidak terlepas dari komitmen dan target-target yang telah ditetapkan pada skala internasional yaitu Agenda Baru Perkotaan atau *New Urban Agenda*

(NUA) yang sejalan dengan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Kedua agenda internasional ini telah diarusutamakan dalam perencanaan pembangunan di Indonesia melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Target-target RPJMN 2020-2024 khususnya terkait perkembangan perumahan, permukiman, dan perkotaan telah mengacu pada indikator SDGs dan tidak terlepas dari visi, prinsip, serta paradigma yang telah disepakati dalam NUA.

12. Pembangunan di bidang perumahan, permukiman, dan perkotaan (bidang habitat) dilaksanakan secara multidimensi, multisektor, dan multiaktor. Oleh sebab itu, dalam penyelenggarannya diperlukan perlibatan dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan baik pada tahap perencanaan, implementasi pembangunan, monitoring dan evaluasi, maupun penyebarluasan informasi penyelenggaraan habitat. Kolaborasi seluruh pemangku kepentingan perlu ditunjang dengan pengelolaan pengetahuan melalui suatu wadah yang dapat menghimpun data dan informasi, serta mengoordinasi proses transfer pengetahuan.

13. **Memperkuat peran Seknas Habitat.** Sekretariat Nasional Habitat Indonesia (Seknas Habitat) yang telah dibentuk sejak tahun 2008 berperan sebagai pusat dan penyebar pengetahuan (*knowledge hub*) bidang habitat. Seknas Habitat merupakan wadah bagi para pemangku kepentingan lintas sektor – yang meliputi pemerintah, pemda, praktisi/ akademisi, dan aktor pembangunan lainnya – dalam membahas isu, merumuskan usulan kebijakan, serta menyelaraskan program/kegiatan di bidang perumahan, permukiman dan perkotaan.

14. Dalam rangka memperkuat peran Seknas Habitat sebagai *center of excellent* di bidang penyelenggaraan Habitat, disusun Roadmap Habitat Nasional 2020-2024 dan Rencana Aksi Habitat Nasional 2020 yang diharapkan dapat menjadi pedoman para pemangku kepentingan untuk berbagi peran dan berkolaborasi untuk mewujudkan pembangunan perkotaan yang inklusif dan berkelanjutan.





1

Merevitalisasi
Center of Excellence
Bidang Habitat

15. National Habitat Committees (NHCs) dan Seknas Habitat.

Untuk mendukung penyelenggaraan agenda habitat di tiap negara, PBB meminta negara anggotanya membentuk organisasi komisi nasional habitat atau *national habitat committees* (NHCs). NHCs juga berfungsi sebagai alat interaksi dan komunikasi dengan unit *Habitat Agenda Partners* (HAP), yaitu berbagai pelaku habitat di semua tingkatan. Di Indonesia, NHCs dibentuk dalam format kesekretariatan yaitu Sekretariat Nasional Habitat Indonesia (Seknas Habitat), karena lebih berperan dalam menghimpun data-informasi, pelaporan capaian agenda habitat, serta memfasilitasi program implementasi oleh lembaga/pelaku lain dengan tidak mengokupasi peran masing-masing.

16. Keterlibatan semua pihak. Implementasi habitat merupakan tugas semua pemangku kepentingan, tidak hanya pemerintah ataupun pemerintah daerah. Pelaksanaan agenda habitat dan *New Urban Agenda* (NUA) sudah dijalankan oleh seluruh komponen lembaga maupun masyarakat, namun secara sporadis dan dengan berbagai keterbatasannya. Dalam hal ini, pemerintah perlu menyinergikan berbagai program, aksi, dan peran tiap pihak agar pencapaiannya menjadi lebih efisien, mencakup skala yang lebih luas, serta tercatat dan terlaporkan dengan baik. Untuk itu, dibutuhkan suatu manajemen pengetahuan Habitat yang fungsinya dijalankan oleh Seknas Habitat.

17. Sebagai tindak lanjut Konferensi Habitat III (Quito, 2016), diarahkan pengembangan kelembagaan habitat tingkat nasional, dengan Bappenas sebagai *focal point* yang didukung Seknas Habitat sebagai sekretariat harian. Selain melibatkan berbagai pemangku kepentingan, kelembagaan habitat nasional ini berfungsi untuk “membumikan” dan memfasilitasi pelaksanaan NUA hingga ke tingkat lokal.

18. **Center of excellence bidang habitat.** Dalam menunjang seluruh peran tersebut dan menyesuaikan perkembangan hingga saat ini, dibutuhkan revitalisasi Seknas Habitat sebagai suatu *center of excellence* bidang habitat. Seknas Habitat perlu dikembangkan dan diposisikan kembali sebagai *knowledge hub* atau simpul pengetahuan habitat, simpul jejaring kemitraan multipihak dan sinergi lintas sektor, serta sebagai pusat data-informasi dalam pelaksanaan agenda habitat nasional dan global.

19. Maka komposisi keanggotaan dari Seknas Habitat sendiri perlu lebih terbuka, dengan melibatkan: (i) berbagai kementerian/ lembaga, parlemen, dan pemda; (ii) kelompok pakar, akademisi, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian; (iii) asosiasi pemerintah dan profesi; (iv) lembaga swasta, badan usaha, dan filantropi; serta (v) komunitas, kelompok masyarakat, kaum muda, dan media.



A SIMPUL PENGETAHUAN HABITAT

20. Knowledge hub bidang perumahan, permukiman, dan perkotaan. Dalam konstelasi nasional, tersebarnya berbagai pengetahuan, data dan informasi mengenai habitat, membutuhkan adanya entitas yang berperan sebagai pusat dan penyebar pengetahuan (*knowledge hub*), yaitu Seknas Habitat. Dengan ini, setiap aktor pembangunan dapat mengakses Seknas Habitat untuk mendapatkan data-informasi baik langsung maupun tidak langsung. Diperlukan suatu mekanisme yang menjalankan siklus manajemen pengetahuan (*knowledge management*), sejak (i) data dikumpulkan, (ii) digunakan, (iii) diperkaya dan (iv) disebarluaskan, (v) dinilai, (vi) dibangun dan dipelihara, selanjutnya kembali ke fase awal. Untuk dapat menjalankan siklus manajemen pengetahuan tersebut, Seknas Habitat harus siap secara konsep kerja dan kelembagaan, *software* dan *hardware* penujang, serta jejaring kemitraan, bersama-sama dengan lembaga pemerintah dan non-pemerintah lainnya.

21. Perbaikan sistem informasi-komunikasi dengan mitra dalam dan luar negeri. Dalam menjalankan fungsinya sebagai simpul pengetahuan habitat, dibutuhkan suatu

sistem informasi-komunikasi yang handal, sehingga dapat menunjang hubungan kemitraan dengan lembaga lain. Secara bertahap dan intensif sistem ini perlu dikembangkan, mulai dari lingkup internal sekretariat harian, Kementerian PUPR, lintas K/L, hingga lintas pemangku kepentingan, baik yang merupakan mitra di dalam dan luar negeri. Perlu adanya suatu integrasi sistem dengan sistem yang sudah ada dalam pengumpulan data-informasi dari berbagai mitra – khususnya dari daerah dan lembaga non-pemerintah – agar sinergi dan memudahkan publik mengakses informasi melalui Seknas Habitat.

22. Pengembangan pusat riset habitat. Kompleksnya persoalan perumahan, permukiman dan perkotaan, khususnya dengan beragamnya karakteristik daerah di Indonesia, mendorong kebutuhan akan pusat riset habitat. Setiap perguruan tinggi ataupun lembaga penelitian memiliki fokus keahlian risetnya masing-masing, dan yang dibutuhkan adalah integrasi hasil riset tersebut untuk dimanfaatkan bagi riset lain atau pengambilan kebijakan pembangunan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah untuk memperkuat hubungan Seknas Habitat dengan

Regional Center for Community Empowerment on Housing and Urban Development (RC-CEHUD) di Puslitbang Permukiman Kementerian PUPR.



B

MENJARING KEMITRAAN MULTIPHIK

23. Identifikasi lembaga pemerintah dan non-pemerintah dalam implementasi NUA. Dengan platform SDGs, khususnya Tujuan 6 dan 11, identifikasi aktor-aktor pembangunan dalam implementasi NUA menjadi lebih jelas dan terukur. Pengidentifikasi aktor tersebut menjadi penting untuk menunjang penyelarasan program dan aksi, sehingga setiap pelaku dapat berbagi peran dan/ atau berkolaborasi dalam pembangunan perumahan, permukiman, dan perkotaan. Dibutuhkan keterhubungan antara lembaga-lembaga hub/simpul di tiap sektor bidang habitat.

24. Pendampingan kemitraan kepada pemerintah daerah. Keterbatasan anggaran pemerintah pusat maupun daerah, serta adanya pemprioritasan dalam pengalokasian dana bantuan ke daerah memaksa tiap pemda untuk dapat kreatif mencari sumber-sumber pembiayaan alternatif. Namun, terbatasnya kapasitas dan jejaring pimpinan daerah dalam penjajakan kemitraan multipihak menjadi tantangan di tingkat lokal. Pemda hanya terpaku pada pendanaan CSR atau bantuan pusat, namun kurang memaksimalkan potensi kemitraan lain yang ada di daerah maupun dengan entitas lain pada lingkup nasional maupun global.

25. Fasilitasi alternatif pembiayaan. Berbagai potensi pembiayaan dari lembaga donor ataupun lembaga internasional/nasional lain, dapat menjadi alternatif pembiayaan dalam pembangunan habitat di tingkat lokal. Dengan membuka *call for proposal*, tiap lembaga dapat mengakses peluang tersebut melalui proposal yang diajukan. Persoalan yang dihadapi adalah lemahnya kualitas proposal pemda maupun lembaga-lembaga kecil lain di daerah. Hal ini perlu diperhatikan oleh Seknas Habitat untuk memberikan fasilitasi pendampingan ataupun akses alternatif pembiayaan bagi pemda dan lembaga non-pemerintah.

26. Advokasi dan penyampaian informasi terkait bottleneck implementasi pembangunan habitat. Secara substantif, terdapat beragam persoalan yang menghambat implementasi pembangunan habitat, termasuk dari sisi kebijakan ataupun operasionalisasi kebijakan pemerintah. Dengan arus informasi dan komunikasi yang dijalankan, Seknas Habitat perlu menghubungkan para pihak serta mengadvokasi kebijakan yang dimaksud. Perlu adanya lembaga yang dapat menjadi tangan pemerintah namun juga penghubung dengan lembaga-lembaga non-pemerintah dan masyarakat.



C

PERAN INDONESIA DALAM AGENDA HABITAT GLOBAL

27. **Menjaga komunikasi dan partisipasi dalam kegiatan habitat global.** Dengan adanya *platform* SDGs dan komitmen-komitmen global lain yang selaras, termasuk NUA, berbagai forum habitat internasional pada merupakan peluang untuk mempromosikan praktik-praktik baik dan pencapaian nasional serta menjajaki peluang sumber daya dari lembaga global. Selain itu, forum internasional non-habitat juga dapat memberikan manfaat bagi kepentingan habitat nasional, karena prinsip kemitraan global sudah menjadi nafas dalam pencapaian SDGs di tiap negara dan lembaga.
28. Berbagai lembaga, baik pemerintah maupun non-pemerintah, terlibat aktif dan rutin dalam kegiatan habitat global. Partisipasi lembaga pemerintahan terkoordinasi oleh Kementerian Luar Negeri, namun keterlibatan banyak lembaga non-pemerintah pada kegiatan habitat global masih kurang terdokumentasikan oleh Seknas Habitat. Hal ini membuat kurang termanfaatkannya informasi dari kancah global karena informasi tersebut tidak disebarluaskan secara publik dan terhambatnya komunikasi antarlembaga. Diperlukan sekretariat harian yang responsif dan proaktif, khususnya dengan entitas habitat global.
29. **Executive Board UN-Habitat.** Terpilihnya Indonesia sebagai satu dari 36 negara anggota *Executive Board* UN-Habitat yang mewakili wilayah Asia Pasifik, dan satu-satunya dari Asia Tenggara, merupakan peluang besar untuk mengarahkan kebijakan dan pengalokasian anggaran UN-Habitat yang bermanfaat bagi Indonesia. Sebagai *Executive Board*, Indonesia memiliki peranan pengawasan terhadap implementasi dan operasionalisasi UN-Habitat. Dengan ini, Indonesia bertangung jawab pula untuk terlibat aktif dalam perencanaan, pelaksanaan serta monitoring-evaluasi kegiatan UN-Habitat.
30. **Publikasi praktik dan pencapaian target NUA dan SDGs pada tingkat internasional.** Sebagaimana disampaikan sebelumnya, peluang-peluang sumber daya bagi kepentingan habitat nasional, dapat diperoleh dengan publikasi aktif terkait praktik dan pencapaian NUA dan SDGs pada kancah global. Hal ini selaras dengan skema manajemen pengetahuan yang perlu dijalankan oleh Seknas Habitat, antara lain dengan: pengembangan basis data, *website* dan portal, serta penyusunan laporan nasional secara berkala yang dipublikasikan melalui media dan forum-forum internasional.







2

Habitat
**Layak Huni dan
Berkelanjutan**
untuk Semua

31. **Visi Bersama.** Untuk mewujudkan habitat yang layak huni dan berkelanjutan, pesatnya laju urbanisasi perlu dilihat tidak hanya sebagai tantangan namun juga suatu peluang. Dengan visi “Kualitas hidup yang lebih baik untuk semua pada dunia yang semakin mengkota”, diperlukan perubahan transformatif dalam pembangunan permukiman dan perkotaan melalui berbagi pengetahuan, pendampingan teknis dan aksi kolaboratif. Hal ini juga sejalan dengan fokus pembangunan SDM lima tahun mendatang dan menuju perwujudan hunian cerdas sesuai Visium PUPR 2030.

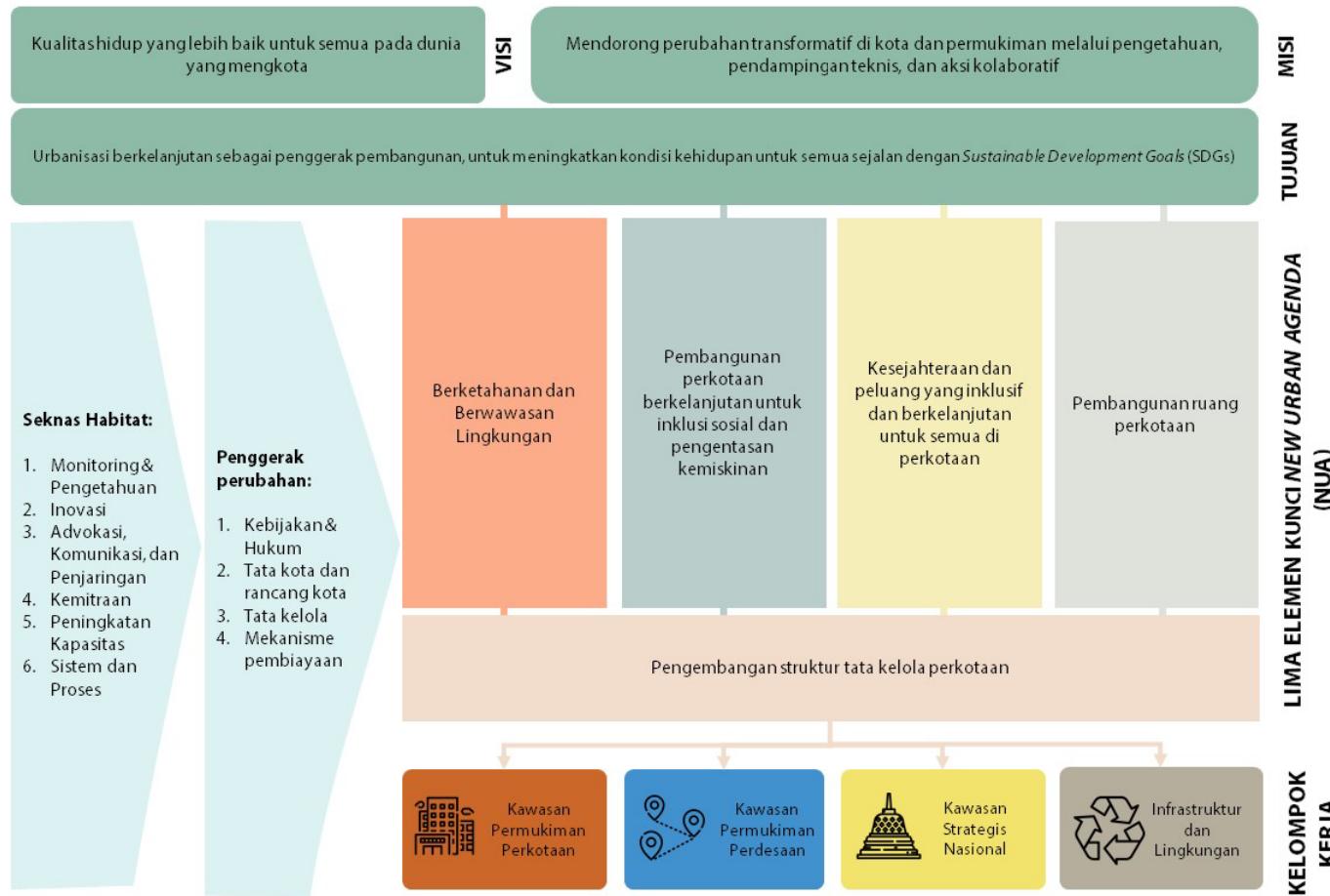
32. **Elemen Kunci NUA.** Berdasarkan NUA, terdapat 5 elemen kunci yang perlu diperhatikan untuk mencapai kualitas hidup perkotaan yang lebih baik, yaitu: (1) Pembangunan perkotaan yang berketeraan dan berwawasan lingkungan; (ii) Pembangunan perkotaan berkelanjutan untuk inklusi sosial dan pengentasan kemiskinan; (iii) Kesejahteraan dan

peluang yang inklusif dan berkelanjutan untuk semua di perkotaan; (iv) Perencanaan dan pengelolaan pembangunan ruang perkotaan; dan (v) Pengembangan struktur tata kelola perkotaan.

33. Kelima elemen kunci tersebut disesuaikan dengan kondisi, karakteristik, dan isu-isu strategis di Indonesia, yang dibahas berdasarkan lokus Kelompok Kerja Seknas Habitat, yaitu: (1) habitat kawasan permukiman perkotaan, (2) habitat kawasan permukiman perdesaan, (3) habitat kawasan strategis nasional, serta (4) habitat infrastruktur dan lingkungan.

34. Isu-isu strategis berikut mendasari perumusan Roadmap Habitat Nasional 2020-2025 serta Roadmap Habitat Nasional 2020, yang digambarkan menjadi kerangka aksi berikut.

Diagram Teori Perubahan Habitat Nasional



A

HABITAT KAWASAN PERMUKIMAN PERKOTAAN

35. **Tidak sinkronnya data dan dokumen perencanaan lintas sektor.** Data dan dokumen perencanaan permukiman dan perkotaan yang tersedia tidak sinkron antar sektor dan lembaga. Hal ini menjadi problem mendasar dalam pemanfaatan data untuk pelaksanaan pembangunan di perkotaan. Dibutuhkan penguatan penyediaan data, termasuk data backlog perumahan.
36. **Terbatasnya kapasitas pemerintah/ pemda dalam pengelolaan kota.** Kota-kota di Indonesia tidak memiliki bentuk ruang yang jelas dan kebanyakan terbentuk secara organik. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kapasitas pemerintah/pemda dalam perencanaan maupun tata kelola perkotaan. Diperlukan intervensi untuk memperkuat kapasitas aparat pemda.
37. **Keamanan bermukim dan legalisasi lahan.** Masalah pertanahan dan kesesuaian guna lahan mengindikasikan persoalan keamanan bermukim masyarakat perkotaan, yang umumnya menempati kawasan permukiman kumuh. Di lain sisi, keberadaan kampung kota memberikan ciri lokalitas kawasan permukiman suatu kota, sehingga diperlukan kajian yang

mendalam dan terukur, khususnya terkait legalisasi lahan. Hal ini juga menjadi kendala dalam pembangunan berbasis kemitraan, karena dukungan beberapa lembaga non-pemerintah untuk membantu pembangunan rumah layak huni bagi MBR seringkali terhambat oleh status legalitas penguasaan tanah.

38. **Rumah tidak layak huni.** Penerapan standar rumah tidak layak huni sebagai sasaran program, yang disertai tidak samanya pemahaman para pelaku pembangunan, menjadi isu strategis dalam pembangunan rumah swadaya. Sebagai contoh, indikator dinding kayu yang dianggap tidak layak, menjadi kendala dalam pelaksanaan program di beberapa daerah dengan kearifan lokal tertentu.

39. **Ketahanan kota terhadap bencana dan perubahan iklim.** Sebagai negara kepulauan di ring of fire, kota-kota di Indonesia memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana. Pembelajaran dari beberapa kota menunjukkan pentingnya keakuratan data dan perencanaan tata ruang, struktur fisik bangunan, serta kesiapan masyarakat dan pemerintah tangguh bencana, yang seluruhnya harus berbasis mitigasi dan adaptasi bencana.



BHABITAT KAWASAN PERMUKIMAN PERDESAAN

40. Urbanisasi dan perdesaan. Pembahasan terkait permukiman perdesaan belum menjadi fokus dalam pengelolaan urbanisasi. Padahal pada faktanya berdasarkan penelitian, transformasi desa-kota terjadi di Pulau Jawa, terutama di kawasan metropolitan Jabodetabek.

41. Potensi yang belum dioptimalkan. Kawasan permukiman perdesaan sendiri memiliki potensi yang patut untuk dikembangkan, seperti potensi pariwisata, peternakan, maupun perikanan. Namun demikian, pemanfaatan potensi lokal ini masih belum dimaksimalkan mengingat masih banyak penduduk desa yang tidak menjadikan komoditi unggulan daerahnya sebagai mata pencarian.

42. Koordinasi lintas sektor. Koordinasi antar stakeholder dalam pengembangan kawasan permukiman perdesaan masih perlu diperkuat sehingga terdapat pembagian tugas dan fungsi yang jelas untuk pengelolaan kawasan perdesaan baik dari pembangunan fisik, pengembangan ekonomi maupun pemberdayaan masyarakat.

43. Dana desa. Pemanfaatan dana desa belum optimal sebab belum adanya platform untuk mengelola anggaran tersebut. Saat ini pemanfaatan dana desa cenderung digunakan untuk membangun infrastruktur dasar seperti air minum dan sanitasi, maupun jalan poros.

Gotong royong : /go-tong ro-yong/

Bericara mengenai kawasan permukiman perdesaan juga tidak terlepas dari karakteristik masyarakat perdesaan, yaitu gotong royong. Karakter ini sekaligus menjadi potensi yang penting untuk diperhatikan. Terlebih sebagai penunjang kegiatan pembangunan infrastruktur kawasan permukiman perdesaan guna mengembangkan daerahnnya.





HABITAT KAWASAN STRATEGIS NASIONAL

44. Keterpaduan perencanaan dan koordinasi lintas wilayah. KSN merupakan wilayah yang menjadi prioritas pembangunan di tingkat nasional dan bertujuan untuk mendorong kemajuan wilayah dan kawasan sekitarnya. Perencanaan terpadu lintas sektor dan koordinasi lintas wilayah perlu diperkuat untuk mendorong tercapainya visi pembangunan kawasan tersebut.

45. Aglomerasi. Pengembangan KSN diharapkan dapat menciptakan aglomerasi dengan pengelolaan urbanisasi yang baik untuk dapat meningkatkan nilai tambah di kawasan sekitarnya. Penetapan kota-kota metropolitan, Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), maupun Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) bertujuan untuk memberikan dampak positif tidak hanya pada kawasan yang ditetapkan, tetapi juga wilayah penyangganya (hinterland).

46. Potensi pariwisata lokal. Penguatan potensi lokal perlu didorong khususnya pada pengembangan KSPN dimana pengembangan pariwisata menjadi hub kegiatan ekonomi baik di wilayah deliniasi KSPN maupun kota-kota sekitarnya.

Selain itu, pengembangan perlu dilaksanakan dengan tetap menjaga karakteristik lokal dari wilayah tersebut.

47. Engine of growth dan pemerataan pembangunan. Pengembangan KSN berperan sebagai *engine of growth*, namun demikian pengembangan wilayah strategis baru seperti pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) tidak akan serta merta menjadikan wilayah tersebut berkembang secara instan menjadi kota besar ataupun metropolitan. Dengan adanya pemindahan IKN, yang didukung dengan pengembangan pusat-pusat kegiatan nasional (PKN) lain, diharapkan terjadi pemerataan pembangunan di Indonesia. Diperlukan perencanaan yang matang dalam mengembangkan wilayah strategis baru, termasuk melalui studi terhadap praktik-praktik

D

HABITAT INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN

- 48. Penegakan hukum dan keterbatasan dana, penyebab sulitnya penyelesaian masalah sanitasi di daerah.** Karakteristik daerah yang, pada umumnya, kurang proaktif membuat diperlukan upaya-upaya untuk memunculkan inisiatif dan pendekatan inovatif dalam menyelesaikan masalah. Dalam hal ini daerah membutuhkan wadah pengayaan, advokasi, dan pemacu ruang inovatif untuk menyelesaikan masalah penegakan hukum dan dana. programnya sehingga potensi program yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal.
- 49. Kemitraan dalam pembangunan infrastruktur lingkungan.** Pembangunan infrastruktur bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan independen sehingga bermitra dapat menjadi alternatif solusi. Namun penjaringan kemitraan masih dilakukan secara sporadis sehingga sulit terwujud. Dengan demikian diperlukan simpul yang dapat mengorganisasikan jejaring kemitraan.
- 50. Wadah koordinasi dan sinkronisasi program penggiat sanitasi.** Masih terdapat aktor-aktor bidang sanitasi, terutama komunitas, yang belum teridentifikasi potensi program yang dapat dijalankan dan dikolaborasikan. Dengan demikian, dibutuhkan wadah yang mampu mengidentifikasi dan menginventarisasi aktor dan
- 51. Pendataan Neraca Sampah dan Neraca Air.** Belum adanya neraca sampah dan neraca air menjadi suatu kendala dalam implementasi bidang persampahan dan air bersih. Dalam hal ini, perlu diperjelas dan diadvokasi kewenangan pendataan neraca sampah dan neraca air.
- 52. Adipura sebagai tools untuk bersinergi dalam bidang sanitasi dan lingkungan.** Penghargaan menjadi salah satu insentif percepatan mencapai suatu tujuan termasuk menumbuhkan kepedulian pada sanitasi dan lingkungan. Adipura memiliki potensi sebagai percepatan perbaikan bidang sanitasi dan lingkungan, terlebih Adipura diwujudkan dengan semangat kolaborasi antar *stakeholder* pada suatu daerah.
- 53. Pewujudan Sanitasi Holistik pada tahun 2024.** Pada tahun 2024, diharapkan terwujud Sanitasi Holistik yaitu terselesaikannya masalah sanitasi secara holistik dengan mengedepankan kolaborasi antar *stakeholder*.







3

Langkah Bersama
Lima Tahun
ke Depan

ROADMAP HABITAT NASIONAL 2020-2025

1

Pembentukan **center of excellence** bidang habitat

Pembentukan Sekretariat Nasional Habitat sebagai *center of excellence* dengan tiga poin penting dalam pengembangannya, antara lain fungsi dan peran Seknas Habitat sebagai *knowledge hub*, wadah jejaring dan kemitraan, serta pengelola arus informasi dan komunikasi bidang Habitat pada tingkat nasional maupun global.

2

Implementasi **platform kemitraan multipihak** melalui **Forum Habitat Nasional**

Forum Habitat Nasional sebagai wadah komunikasi para pemangku kepentingan untuk mengomunikasikan ide dan informasi terkait bidang Habitat. Forum ini juga berfungsi sebagai platform kemitraan multipihak untuk menindaklanjuti gagasan menuju aksi-aksi implementasi agenda-agenda Habitat.

3

Pelaksanaan **program kolaborasi lintas sektor dan multipihak** yang kontinu dan berkesinambungan

Luasnya lingkup kerja bidang Habitat menuntut berbagai aktor berpartisipasi dalam implementasi agenda Habitat. Aspek multipihak ini perlu dikembangkan menjadi program dan aksi kolaboratif agar terjadi keserasian antar program dan aksi. Selain itu, kontinuitas dan kesinambungan program dan aksi juga perlu menjadi perhatian untuk menjamin terwujudnya agenda Habitat.

4

Implementasi pembangunan habitat dengan skema pembiayaan multipihak yang berkeadilan

Skema Pembiayaan Multipihak yang Berkeadilan dilaksanakan melalui kolaborasi antar *stakeholder* yaitu pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha, maupun lembaga terkait lainnya yang bertujuan untuk mengatasi gap pendanaan dalam pembangunan bidang habitat. Konsep berkeadilan dalam pembiayaan diimplementasikan melalui kesepakatan yang saling menguntungkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

5

Penguatan implementasi peraturan dan penegakan hukum secara terstruktur dan dengan pendekatan inovatif

Penguatan Implementasi Peraturan dan Penegakan Hukum. Berbagai peraturan terkait bidang Habitat sudah banyak dibentuk namun tidak didukung dengan penegakan hukum yang kuat. Hal ini berimplikasi kegagalan dan rendahnya ketercapaian agenda Habitat. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan implementasi peraturan dan penegakan hukum secara terstruktur. Pendekatan inovatif juga diperlukan sebagai upaya mendobrak kebiasaan masyarakat yang terbiasa dengan penegakan hukum yang lemah.

6

Pemberdayaan komunitas dan *local champions* secara terstruktur untuk menunjang pembangunan habitat

Pemberdayaan komunitas dan *local champions* bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dengan pengaruh yang lebih besar dan berdampak langsung terhadap pembangunan bidang habitat. Penguatan relawan dan *local champion* dilaksanakan untuk mendorong terciptanya pembangunan bidang habitat dengan lingkup yang lebih luas.

7

Pemenuhan komitmen NUA dan pencapaian SDGs bidang habitat

Komitmen NUA dan Pencapaian SDGs Bidang Habitat dilaksanakan melalui penyelarasan komitmen-komitmen NUA dengan target-target SDGs bidang perkotaan yang akan ditindaklanjuti melalui sosialisasi kepada seluruh *stakeholder* bidang habitat untuk selanjutnya dapat menjadi pedoman dalam monitoring dan evaluasi pencapaian NUA dan SDGs.

8

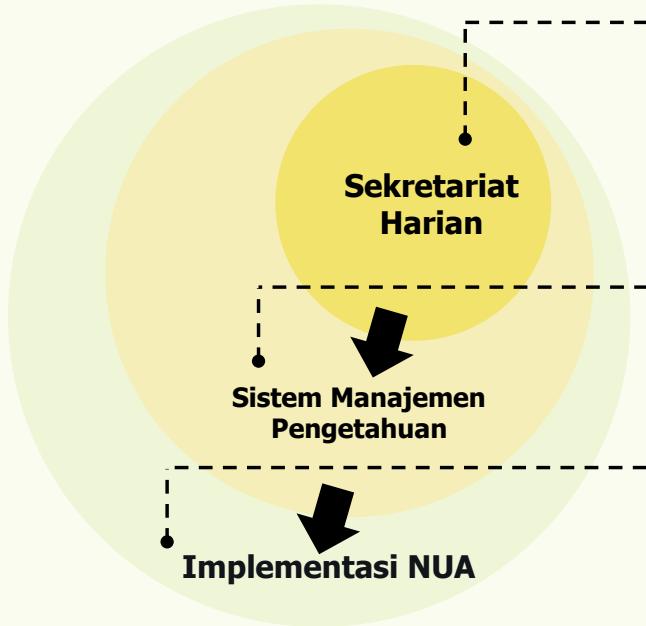
Penguatan keterpaduan rencana dan sinergi program habitat dalam kerangka Kebijakan Perkotaan Nasional

Sinergitas antar sektor dalam pengembangan perkotaan dilaksanakan melalui keterpaduan rencana dan sinergi program antara pemerintah di tingkat pusat dan daerah. Sinergitas di tingkat pusat bertujuan untuk mensinkronkan arah kebijakan sektoral di masing-masing wilayah, sedangkan sinergitas dengan pemerintah daerah dilakukan untuk menyelaraskan arah pengembangan wilayah dengan kebijakan pusat.

9

Penerapan prinsip kota berkelanjutan dalam pengembangan Ibu Kota Negara dan pusat-pusat pertumbuhan baru

Penerapan Prinsip-Prinsip Kota Layak Huni dan Berkelanjutan dalam pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru termasuk IKN untuk mewujudkan pertumbuhan kawasan perkotaan yang lebih terkendali dan mewujudkan urbanisasi yang berkelanjutan. Hal ini dilakukan dengan penjajakan peluang kolaborasi dan kerjasama antar pihak dalam menggali konsep-konsep keberlanjutan yang sesuai dengan karakteristik dan visi pengembangan wilayah.



Pembentahan Sekretariat Harian:

- a. Pembaharuan SK Seknas
- b. Penelusuran data & perapihan database Seknas

Pengembangan Sistem Man. Pengetahuan:

- a. Identifikasi ruang lingkup
- b. Kelembagaan Seknas
- c. Knowledge manager & tim manajemen pengetahuan
- d. Portal & website Seknas
- e. Mekanisme & SOP arus data-informasi internal & eksternal (K/L/daerah)

Implementasi NUA:

- a. Kesepahaman implementasi NUA (lintas Unor & K/L)
- b. Kriteria-indikator NUA-SDGs & skema monev NUA
- c. Forum Habitat Nasional
- d. Strategi komunikasi NUA
- e. Peningkatan kapasitas daerah & percontohan
- f. Sistem pelaporan NUA

**Selaras
dengan
rencana
Peringatan
HHD-HKD**





4

Rencana Aksi **Habitat Nasional** 2020

RENCANA AKSI HABITAT NASIONAL 2020

RENCANA TINDAK	OUTPUT
1. Pertemuan koordinasi bidang habitat lintas sektor dan antar pemangku kepentingan <ul style="list-style-type: none">Koordinasi antar K/L melalui Rapat Eselon I untuk pembagian peran dan tugas dalam penyelenggaraan pembangunan habitatKoordinasi pemerintah dan pemda dalam rangka sinkronisasi programKoordinasi dengan asosiasi pemerintah, asosiasi profesi dan pakar habitatKlaster Filantropi Permukiman dan Perkotaan	Kesepakatan dalam implementasi agenda habitat nasional
2. Penguatan kelembagaan sekretariat harian dan kelompok kerja Seknas Habitat <ul style="list-style-type: none">Perlu dibentuk tim kerja yang membahas konsep kelembagaan Seknas Habitat dan tindak lanjut penyusunan Roadmap dan Rencana Aksi	Mekanisme kerja Seknas Habitat yang lintas K/L dan lintas pemangku kepentingan
3. Pengembangan website, portal, dan media Seknas Habitat yang terhubung dengan jejaring nasional dan internasional <ul style="list-style-type: none">Pengembangan website dan portal Seknas HabitatPengaktifan secara masif media informasi Seknas HabitatIdentifikasi jejaring media informasi habitat nasional dan internasionalPublikasi, propaganda, dan kampanye publik isu-isu habitat	Media informasi Seknas Habitat yang handal dan menarik

RENCANA TINDAK	OUTPUT
4. Pengembangan sistem data-informasi Habitat Nasional untuk kebutuhan basis data/informasi	
<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan basis data-informasi Koordinasi dengan Sekretariat SDGs, BPS, Puskom PUPR dan K/L lain 	Basis data-informasi Habitat yang lengkap dan terkini
5. Pembentukan Tim Pendataan Pelaku Habitat (Perumahan dan Permukiman)	
<ul style="list-style-type: none"> Pendataan pelaku lintas pemangku kepentingan, kontak, dan program terkait habitat sebagai basis data jejaring Habitat Nasional 	Basis data jejaring pelaku Habitat Nasional
6. Pemanfaatan Forum Habitat Nasional sebagai implementasi platform kemitraan multipihak dengan orientasi aksi bersama	
<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan forum lintas pelaku secara berkala menuju Forum Habitat Nasional saat Peringatan Hari Habitat Dunia 2020 	Kesepakatan kerja sama implementasi pembangunan
7. Menjalankan peran Indonesia sebagai Executive Board UN-Habitat (2019-2021)	
<ul style="list-style-type: none"> Partisipasi dalam penyusunan roadmap UN-Habitat Pengawasan keberlangsungan kegiatan UN-Habitat 	Selarasnya kebutuhan habitat nasional dengan program UN-Habitat

RENCANA TINDAK

OUTPUT

8. Rembuk Sanitasi Nasional

- Mendukung agenda tahunan bidang sanitasi, berbentuk pertemuan dan implementasi program, contohnya dalam bentuk Jambore Indonesia Bersih Bebas Sampah 2020 dan Konferensi Sanitasi Nasional

Komitmen Pelaksanaan Rencana Aksi Sanitasi Nasional dan Daerah

9. Pelaksanaan KKN Tematik Infrastruktur Permukiman

- Mendorong kemitraan dengan institusi perguruan tinggi dalam pengembangan infrastruktur permukiman bersama masyarakat

Keterlibatan mahasiswa dalam pendampingan masyarakat

10. Sosialisasi dan penyempurnaan Panduan Praktis Implementasi NUA

- Diseminasi sekaligus penguatan kapasitas pemda dalam isu perkotaan dan implementasi NUA

Rencana Kerja Daerah dalam Implementasi NUA

11. Pilot project bidang sanitasi berbasis kemitraan

- Kick-off penentuan kota-kota lokasi pilot project bidang sanitasi
- Penentuan lokasi yang selanjutnya terlibat dalam kolaborasi dan fasilitas pembangunan pilot project dengan melibatkan para pemangku kepentingan

Pembangunan infrastruktur sanitasi berbasis kemitraan

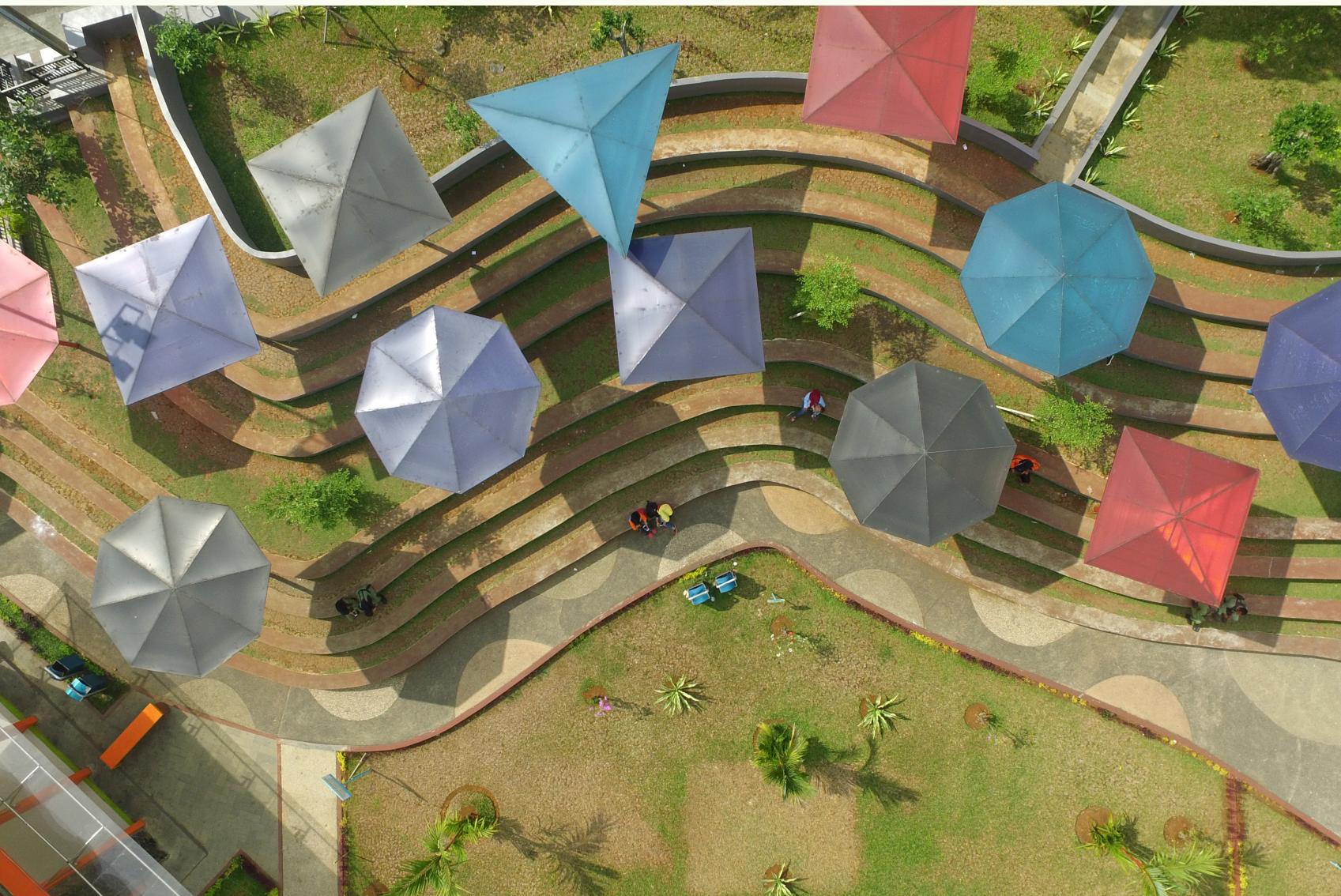
12. Pendampingan konstruksi

- Melalui pemberdayaan masyarakat khususnya di permukiman
- Bekerja sama dengan Ditjen Bina Konstruksi

Keandalan infrastruktur permukiman

Sasaran strategis	2020	2021	2022	2023	2024
Penguatan arus informasi-komunikasi habitat dan kemitraan multipihak hingga tingkat lokal 	Memperkuat sistem manajemen pengetahuan habitat	Penguatan kelembagaan sekretariat harian dan Pokja Seknas Habitat	Basis data, portal, situs Seknas Habitat	Pelaksanaan manajemen pengetahuan habitat (kontinu)	
		Mekanisme arus data-informasi pusat dan daerah	Pengumpulan data-informasi baseline	The State of Indonesian Cities (per 2 tahun)	
Mengembangkan wadah komunikasi antar pemangku kepentingan			Forum Habitat Nasional (secara rutin dan tiap tahun)		
				Advokasi hasil riset lembaga penelitian/ perguruan tinggi pada lembaga pemerintah	
			Sosialisasi isu/program bidang habitat: kampanye publik, diskusi tematik, dll.		Peringatan Hari Habitat Dunia dan Hari Kota Dunia

Sasaran strategis	2020	2021	2022	2023	2024
<p>Penguatan arus informasi-komunikasi habitat dan kemitraan multipihak hingga tingkat lokal</p>  <p>Memperkuat sistem manajemen pengetahuan habitat</p>	<p>Penguatan kelembagaan sekretariat harian dan Pokja Seknas Habitat</p> <p>Basis data, portal, situs Seknas Habitat</p> <p>Mekanisme arus data-informasi pusat dan daerah</p> <p>Pengumpulan data-informasi baseline</p>	<p>Pelaksanaan manajemen pengetahuan habitat (kontinu)</p>			
<p>Mengembangkan wadah komunikasi antar pemangku kepentingan</p>		<p>Forum Habitat Nasional (secara rutin dan tiap tahun)</p> <p>Advokasi hasil riset lembaga penelitian/ perguruan tinggi pada lembaga pemerintah</p> <p>Sosialisasi isu/program bidang habitat: kampanye publik, diskusi tematik, dll.</p> <p>Peringatan Hari Habitat Dunia dan Hari Kota Dunia</p>			







5

Rencana Aksi **Sungai Citarum** 2020

Rencana Tindak	Target Waktu	Pelaksana	Output
Sosialisasi di sekolah tentang Pentingnya Membuang Sampah pada Tempatnya	Desember 2019	Komunitas Peduli Lingkungan	Peningkatan kesadaran siswa/i dan seluruh civitas akademik untuk memilah dan mengolah sampah
Gerakan Pungut Sampah di anak Sungai Citarum/Cimunjur	Desember 2019	Pelajar dan Perwakilan Pecinta Alam	Peningkatan kesadaran warga terhadap lingkungan bantaran sungai yang bebas sampah, Pengurangan pencemaran di anak Sungai Citarum
Gerakan Pungut Sampah pada Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN)	21 Februari 2020	Pelajar	Inisiasi agenda rutin tahunan
Kampanye Media Sosial dengan #MilenialPeduliCitarum	Setiap bulan	Jurnalis di tingkat SMK	Foto dalam buletin
Komposter dari Sumber #keluargapeduliorganik #keluarganolsampah #familyzerowaste #keluargakosongruntah	Setiap Bulan September	Rumah Tangga	Pemberian reward untuk rumah tangga
Jambore Penggiat Lingkungan di tingkat provinsi/ kabupaten/ kota	Mei 2020	Forum Komunikasi Bebas Sampah	Terwujudnya sinergitas penggiat lingkungan untuk menghasilkan aksi kolaboratif untuk membantu pemerintah mencapai target jakstrada; ditindaklanjuti dengan pertemuan 3 bulanan melalui fasilitasi DLH/PUPR
Pemasangan jaring di sungai	Mei – September 2020	PUPR dan Komunitas	Pengurangan sampah yang masuk ke badan air (sungai)

Rencana Tindak	Target Waktu	Pelaksana	Output
Gerakan pengurangan sampah: <ul style="list-style-type: none"> - Membawa tumbler, tempat makan dan tas belanja - Menolak kantong plastik <ul style="list-style-type: none"> - Menolak sedotan - Jajan tanpa kemasan 	Reguler Setiap Bulan	Pelajar, Civitas Akademika, KLHK	Persuasi kepada masyarakat terutama milenial untuk mengurangi sampah dari sumber atau sejak awal
Kampanye penegakan aturan untuk pengurangan sampah dan pemilihan sampah dari sumbernya	Reguler Setiap 3 Bulan	Forum Komunikasi Bebas Sampah	Hasil dukungan melalui tanda tangan (target lebih dari 100.000) melalui link penegakan hukum persampahan bit.ly/AspirasiBebasSampah
Gerakan Menabung Air	Peringatan Hari Air	KLHK, KemenPUPR	<ul style="list-style-type: none"> - Poster atau Buku Pedoman cara membuat biopori, sumur resapan, sumur retensi, wetland, dll yang disusun melalui seminar sehari tentang <i>green</i> dan <i>blue infrastructure</i> - Berkurangnya jumlah air larian yang langsung ke sungai dan laut - Bertambahnya jumlah biopori, wetland, sumur retensi, dll melalui kegiatan gerakan serentak
Integrasi TPS-3R dan Bank Sampah di sepanjang aliran Sungai Citarum (kegiatan melalui FGD)	Februari 2020	KLHK, KemenPUPR, asosiasi bank sampah, komunitas penggiat lingkungan	Optimalisasi fungsi TPS-3R dan terbentuknya KSM yang solid dalam pengelolaan sampah yang terintegrasi dengan bank sampah setempat

Rencana Tindak	Target Waktu	Pelaksana	Output
Peningkatan kapasitas fasilitator TPS-3R dan fasilitator eco village dalam penyamaan persepsi untuk pendampingan masyarakat di bantaran sungai (pertemuan workshop)	Reguler setiap 3 bulan	KLHK, KemenPUPR, Pemerintah Daerah	Tersusunnya platform pendampingan masyarakat di bantaran sungai
Lomba membuat bekal kreatif minim sampah	November 2020	Kader PKK	Buku resep masakan dan aneka tampilan
Pasar Workshop	Oktober 2020 (Peringatan HHD dan HKD)	Kolaborasi KLHK, KemenPUPR, Kemenperin	Meningkatnya kreatifitas dan jejaring penggiat lingkungan, bentuk penanganan sampah dengan kreatifitas masyarakat
Lomba Inobasi Kemasan Ramah Lingkungan	April 2020 (Peringatan Hari Bumi)	Kemenperin, KemenUMKM	Munculnya inovasi kemasan yang bebas plastik dan tidak menghasilkan sampah
Pendataan penggiatan lingkungan di bantaran Sungai Citarum	Januari-Februari 2020	Penggiat lingkungan	Buku puzzle aksi para komunitas dan penggiat lingkungan
Pendataan penduduk yang tidak terdaftar di kewilayahan setempat tinggal di bantaran sungai	Juni 2020	Penggiat lingkungan	Data kondisi wilayah dan penduduk bantaran sungai
Inventarisasi dan sinergi program antar K/L yang berkaitan dengan persampahan	Desember 2019 – Januari 2020	Bappenas, Kemdagri, KLHK, Kemenkes, KemenPUPR, Pemda	Program sinergi antar K/L yang berdampak bagi masyarakat
Pembuatan media edukasi	Agustus 2020 (Hari Anak Nasional)	KLHK, Kemendiknas, Kemenpora, KPPA	Media edukasi yang terstandarkan untuk setiap jenjang
Pendampingan desa di bantaran Sungai Citarum menuju desa wisata	Maret-Agustus 2020 (pendampingan); Oktober-November 2020 (launching)	Kemenpar, Dinas Pariwisata	Terwujudnya desa wisata yang memenuhi sapta pesona, 1 desa dapat dikunjungi sebagai desa wisata





Sekretariat Nasional Habitat Indonesia
Jalan Wijaya I Nomor 68, Jakarta Selatan 12170
DKI Jakarta – Indonesia
+6221 722 6530
<http://ciptakarya.pu.go.id/seknashabitat/>